

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada setiap muslim dan muslimah yang mampu untuk melaksanakannya, (Abu Bakr Jabir Al-jazairi, 2000: 435)

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (Qs. Ali Imran: 97).

Banyak umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji ini diseluruh dunia termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan animo pendaftar haji yang setiap tahunnya terjadi peningkatan.

Indonesia pada tahun 2014 menjadi negara nomor satu di dunia dengan jumlah mayoritas muslim paling banyak dengan 87,18% penduduknya Muslim dari total keseluruhan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Menurut data BKKBN pada tahun 2014 jumlah penduduk di Indonesia adalah 240 juta jiwa, 87,18% dari keseluruhan penduduk adalah Muslim, yaitu sekitar 209,232 juta jiwa. Dengan penduduk muslim yang banyak tentu setiap tahunnya akan adanya lonjakan-lonjakan dari penduduk muslim yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, walaupun harus menunggu waktu yang tidak sebentar dari 5 tahun hingga belasan tahun, ini disebabkan karena keterbatasan kuota yang di sediakan oleh pihak Kerajaan Arab calon jemaah haji yang setiap tahunnya semakin meningkat, maka pemerintah membuat peraturan penyelenggaraan Ibadah Haji yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembinaan terhadap jamaah haji mutlak dilakukan, yaitu untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji dan umroh

dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh mulai pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah haji maupun umroh.

Mengacu kepada jumlah jemaah haji yang setiap tahunnya semakin meningkat, ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, yang didalamnya terdapat prosedur mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan, yang semuanya harus diinformasikan kepada calon jemaah haji dengan jelas, agar calon jemaah haji mengetahui berbagai informasi tentang prosedur pemberangkatan Ibadah haji. Dalam prosedur pemberangkatan terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan Ibadah Haji, seperti banyak masyarakat yang ingin mengetahui nomor porsi, ingin mengetahui tahun berapa mereka berangkat, ataupun berbagai hal yang berkaitan dengan pemberangkatan Ibadah Haji.

Pada faktanya dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengenai informasi yang harus disampaikan kepada calon jemaah haji masih kurang, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang berbagai informasi yang berkaitan Ibadah Haji.

Era -modern seperti saat ini tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Adapun yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan bagi para calon jemaah haji untuk mengakses informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Ibadah Haji.

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), merupakan suatu sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan data, termasuk memproses, menyusun dan menyimpan, sistem yang telah dibuat ini akan mempermudah para calon jemaah haji untuk mengakses berbagai permasalahan yang ingin ditanyakan, seperti permasalahan ingin menanyakan tentang nomor porsi dan permasalahan lainnya (*bali.kemenag.go.id*).

Adanya teknologi informasi dalam pengelolaan data di bantu dengan adanya sistem yang sudah ada, dalam hal ini haruslah ada transparansi/keterbukaan informasi yang telah dikelola, diproses, disusun dan disimpan untuk di sebarluaskan kepada masyarakat melalui teknologi berupa media-media yang sudah semakin canggih seperti pembuatan web yang didalamnya menjelaskan tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan Ibadah Haji.

Oleh karena itu, implementasi Siskohat sangat penting untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan ibadah haji, dan menyimpannya dengan rapi dan aman sehingga akan mempermudah dalam pencarian data dan juga akan terjaga dari hilangnya berbagai data penting. Adanya Siskohat ini akan membantu masyarakat/para calon jemaah haji untuk mempermudah mereka dalam pencarian data yang mereka inginkan mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Ibadah haji. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan informasi, yang itu akan merugikan calon jemaah haji (Republika online, diakses tanggal 21 Januari 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi bahwa masalah pokok yang diteliti adalah Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Memberikan Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji.

Agar penelitian terarah pada tujuan dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan-batasan yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Siskohat dalam memberikan informasi kepada calon jemaah haji?
2. Bagaimana implementasi program Siskohat dalam pemberian informasi kepada calon jemaah haji?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Siskohat dalam memberikan informasi kepada calon jemaah haji?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang peneliti ajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut?

1. Untuk mengetahui peranan Siskohat dalam pemberian informasi kepada calon jemaah haji.
2. Untuk mengetahui implementasi Siskohat dalam pemberian informasi kepada calon jemaah haji.
3. Untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Siskohat dalam memberikan informasi kepada calon jemaah haji.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah pemikiran, pengetahuan, pemahaman dalam Bagaimana Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

2. Dari segi praktis

Diharapkan memberi pemasukan positif, bagi organisasi, terutama pemerintah berkaitan dengan Implementasi Siskohat yang berkaitan dengan transparansi informasi bagi jemaah haji, sehingga tidak ada kesalah pahaman oleh calon jemaahan haji, berkaitan dengan informasi Haji.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mempertajam penelitian yang dilakukan, peneliti membandingkan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lainnya, dengan masalah penelitian yang sejenis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Neneng Uliah (2013, tidak diterbitkan) yang berjudul *“Implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Kanwil Kementerian Agama Prov DKI Jakarta”* dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan sistem Haji terpadu. Ini menjelaskan implementasi kebijakan Siskohat ini telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan mulai dari penransmisian informasi yang berlapis sehingga kurangnya pemahaman pegawai akan kebijakan Siskohat, penempatan sumber daya manusia pada bagian Siskohat dengan latar belakang pendidikan, minimnya pelatihan yang diberikan kepada staf pelaksana, tidak digunakannya Standard Operational Phrocedure (SOP) sebagai pedoman bekerja karena tidak sesuai kondisi yang ada, besarnya pengaruh struktur birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenag staf pelaksana. Dengan melihat kondisi tersebut, maka diperlukan saluran komunikasi yang cepat dan tidak berlapis, proses rekrutmen staf pelaksana Siskohat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, adanya pelatihan rutin

guna menambah pengetahuan implementator serta diperlukan pembaharuan SOP yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Skripsi yang disusun oleh Mutmainnah (2011, tidak diterbitkan) yang berjudul “*implementasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) pada kementerian Agama republik Indonesia*” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Siskohat adalah sistem aplikasi, untuk mengolah seluruh data perhajian di Indonesia yang sudah berbasis teknologi informasi, yang bertugas mengatur pendaftaran, data base dokumen haji, akuntansi BPIH, database transportasi haji, database penempatan pemondokan jemaah, informasi publik, sistem informasi kesehatan haji, dan database petugas haji. Dengan menerapkan sistem ini seluruh pelayanan ibadah haji mulai dari pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Sehingga seluruh pelaksanaan haji dapat terselenggara dengan baik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kelancaran dan kecepatan pelayanan haji.

F. Kerangka Berpikir

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menyatakan makna implementasi adalah: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan belaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk menadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu –individu pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

b. Teori Implementasi

Karya Pressman dan Wildavsky ini adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Dalam tulisan mereka yang berjudul *Implementation (1973)*, mereka menyatakan bahwa sejauhmana implementasi dapat berhasil tergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Karenanya kerjasama, koordinasi dan kontrol memegang peranan sangat penting. Jika tindakan-tindakan bergantung pada kaitan-kaitan dari mata rantai implementasi, maka tingkat kerjasama antar departemen yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%, karena apabila ada hubungan kerjasama dalam rangkaian mata rantai tersebut yang defisit, maka akan menyebabkan kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan kemungkinan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis.

Rumusan mereka mungkin berguna manakala policy implementasi tidak melibatkan banyak aktor dan berbagai tingkatan, sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa diperhitungkan untuk bisa segera diambil tindakan perbaikan. Namun rumusan ini sulit diterapkan pada kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antar aktor dari berbagai organisasi/departemen sangat jarang berlangsung mulus karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuan sendiri. Oleh karenanya pendekatan Game Theory mungkin lebih bisa dimanfaatkan daripada teori Probabilitas untuk menganalisis Implementasi. Dengan kata lain pendekatan Kolaborasi antar aktor

yang terlibat bisa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dalam rantai implementasi.

Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan mesetinya tidak menjanjikan apa-apa yang tak dapat mereka penuhi, karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down serta sumberdaya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, maka sebaiknya pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi.

2. Pengertian Sistem

Dalam bukunya, Gordon B. Davis menyatakan sistem sebagai berikut: *system can be abstract or physical. An Abstract system is an orderly arrangement of interdependent ideas or constructs. For example, a system of theology is an orderly arrangement of ideas about God, man, etc. A physical system is a set of elements which operate together to accomplish an objective* (sistem dapat abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi-konsepsi yang saling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah sistem yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. (Malayu S.P Hasibuan, 2001:253).

3. Pengertian informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang informasi ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan disini, yaitu (Tata Sutabri, 2013: 2):

- a. Informasi merupakan hasil pengolahan data

- b. Memberikan makna atau arti
- c. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian

Sedangkan Mc Leod (Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi. 2013 :2) mengatakan suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri –ciri:

- a. Akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penguji terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
 - b. Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
 - c. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi diberbagai tingkatan atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
 - d. Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan yang tidak ada bulannya atau tidak ada fakturnya.
4. **Macam-macam Sistem Informasi**

Pada era globalisasi sekarang ini bisa dikatakan seluruh perangkat kerja diberbagai organisasi telah menggunakan dan menerapkan konsep sistem informasi yang modern. Kecuali dibeberapa kawasan dinegera berkembang yang di anggap masih belum tersentuh oleh pengaruh dampak teknologi. Penerapan sistem informasi tersebut terlihat diberbagai kantor-kantor, supermarket, rumah sakit, lembaga pendidikan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Dan penggunaan sistem informasi ini tanpa kita sadari merupakan kebutuhan bukan lagi dianggap ssebagai pelengkap semata.

Dalam kondisi dan situasi sekarang ini ada banyak macam sistem informasi, menurut Abdul Kadir ada bermacam-macam sistem informasi, antara lain:

- a. Sistem resevasi pesawat terbang: digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan tiket/pembelian tiket.
- b. Sistem untuk menangani penjualan tiket kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan.
- c. Sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tak berwenang memasuki fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari atau retina mata.
- d. Sistem POS (*point of sale*) yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca bercode untuk mempercepat pemasukan data.
- e. Sistem telementri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar jembatan rel kereta api.
- f. Sistem berbasis kartu cerdas yang dapat digunakan oleh juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang terekam data-data mengenai pasien.
- g. Sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat , periwisata, pertokoan, dan lain-lain.
- h. Sistem layanan akademik berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademisi atau bahkan dapat mendapftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru.
- i. Sistem pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange* atau EDI) yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan dapat diproses secara langsung oleh komputer.
- j. *E-government* atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet (Irham Fahami, 2011: 250).

5. Pengertian *E-Government*

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomatisasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai *world wide web* (www). Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G To C (Government to Citizen), G To B (Government to Business), dan G to G (Government to Government).

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti *government to citizen* (G2C), *government to business* (G2B), *government to government* (G2G), dan *internal efficiency & effectiveness* (IEE).

- a. *Government to citizen* (G2C), adalah layanan untuk individual atau masyarakat. G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan mudah digunakan untuk semua layanan pemerintah kepada masyarakat.
- b. *Government to business* (G2B), adalah untuk layanan bisnis. G2B mengurangi beban kerja pengontrolan bisnis dalam laporan keuangan perusahaan pada pemerintah, perhitungan pajak, dan sebagainya dengan cara menghilangkan duplikasi pengumpul data.
- c. *Government to government* (G2G), adalah layanan antarpemerintah. G2G memudahkan penyelenggaraan pemerintah lokal untuk mendapatkan data partnernya.

d. *Internal efficiency & effectiveness (IEE)*, adalah layanan untuk internal pemerintahan.

IEE yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya administrasi pemerintahan.

6. Faktor Pendukung Kesiapan Pelaksanaan *E-Government*

Sebagaimana layaknya suatu sistem berjalan, diperlukan adanya beberapa faktor yang dapat mendukung kesiapan suatu instansi untuk melaksanakan *e-government*. Berikut sejumlah faktor penentu yang harus diperhatikan bagi suatu institusi atau suatu daerah yang hendak menerapkan *e-government*, yaitu:

a. Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam lebel pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan *e-government*.

b. Tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi (TI) oleh pemerintah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah banyak sekali lembaga internasional atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga kini sudah dalam kondisi rusak.

c. Kesiapan sumber daya manusia di pemerintah

“Pemain utama” atau subyek didalam inisiatif *e-government* pada dasarnya adalah manusia yang bekerja dilembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan *e-government*.

d. Ketersediaan dana dan anggaran

Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *e-government* yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya.

e. Perangkat hukum

Karena konsep *e-government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual, misalnya, akan merupakan hal perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.

f. Perubahan paradigma

Pada hakikatnya penerapan *e-government* merupakan suatu proyek *change management* yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari.

Target terakhir dari sebuah evolusi *e-government*, yaitu perbaikan dan peningkatan terhadap partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Partisipasi di dalam *e-government* bisa dituangkan dalam bentuk:

- a. Memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitutionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas *email* dan *mailing list*.
- b. Mencari data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktifitas sehari-hari dari sejumlah *website* yang dimiliki oleh pemerintah.
- c. Mengikuti beragam dialog atau *public hearing* yang dilakukan secara *online* melalui internet dan lain sebagainya.

7. Manfaat *E-Government*

Manfaat *E-Government* adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan hubungan antar pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien.

- a. Pelayanan kepada masyarakat, informasi yang disediakan secara terus –menerus, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari rumah, kantor, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah.
- b. Peningkatan hubungan antarpemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum ada transparansi, hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dengan adanya informasi masyarakat belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
- d. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui *e-mail* atau *video conference* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

8. Tujuan *E-government*

Selain mendatangkan sejumlah manfaat, penerapan *e-government* juga memiliki sejumlah tujuan atau bahkan *e-government* dijadikan sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang dikemukakan West (2004) bahwa *e-government* secara umum bertujuan untuk:

- a. Memberikan akses yang lebih luas pada informasi-informasi pemerintah.
- b. Memprimosikan keterlibatan masyarakat dengan memudahkan masyarakat masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah.
- c. Membantu pemerintah semakin akuntabel melalui pemerintahan yang lebih transparan sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan korupsi
- d. Memudahkan pemerataan pembangunan dan akses layanan pemerintah, khususnya pada masyarakat urban dan pedesaan.

9. Level Pengembangan *E-Government*

Perkembangan *e-government* dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas pengembangan dan fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat. Pengembangan

e-government terdiri dari level informasi, level interaksi, level transaksi, dan level integrasi.

- a. Level informasi, pada level ini hanya digunakan untuk sarana publikasi informasi pemerintah secara *online*.
- b. Level interaksi, pada level ini menyediakan sarana untuk interaksi dua arah antara pejabat pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.
- c. Level transaksi, pada level ini menyediakan sarana untuk bertransaksi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan publik, yakni transaksi yang melahirkan kesepakatan layanan publik yang telah digunakan.
- d. Level integrasi, semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah selain disediakan secara konvensional juga disediakan secara *online*.

10. Hambatan pengembangan *E- Government*

Hambatan pengembangan e- Government jika ditinjau dari perspektif birokrasi sebagai penyelenggara layanan publik adalah *hardware*, *orgaware*, dan *peopleware*.

- a. *Hardware*, yakni berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur, terbatasnya *hardware* dan *software* serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan lokal maupun global.
- b. *Orgaware*, instansi pemerintah dalam mengoperasikan e-government masih menemukan kendala dalam aspek organisasi.
- c. *Peopleware*, sumberdaya manusia dalam menggunakan teknologi internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government terhadap pihak luar (Yakub, 2012: 132).

G. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah – langkah penelitian merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data – data dalam suatu karangan ilmiah yang nyata dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun langkah – langkah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanwil (kantor Wilayah) Kementerian Agama Jawa Barat yang terletak di Jln. Jendral Sudirman No.644 Bandung Jawa Barat. Pengambilan lokasi di daerah tersebut mengingat besarnya kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan. Pertimbangan ini berdasarkan bahwa judul penelitian yang diinginkan tentang Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara lebih luas (Sugiyono, 2005:21). Adapun pendapat lain menyatakan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Suharmini Arikunto, 2002:30). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data – data informasi tentang Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif menurut Bog dan Taylor data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati. Adapun data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian diklasifikasikan meliputi: (Dewi Sadiyah,2014:93).

- a. Data yang berhubungan dengan peran Siskohat dalam memberikan transparansi informasi kepada calon jemaah haji.
- b. Data yang berhubungan dengan Implementasi program Siskohat dalam memberikan transparansi Informasi kepada calon jemaah haji
- c. Data yang berhubungan dengan sosialisasi Siskohat dalam memberikan transparansi informasi kepada calon jemaah haji.

4. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang diteliti adalah Bapak Amri Yusri sebagai salah satu staf dari Siskohat Kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi Siskohat Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik – teknik sebagai berikut:

- a. Observasi diartikan sebagai studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala – gejala alam dengan jalan pengumpulan dan pencatatan.

b. Wawancara, teknik ini dimaksudkan untuk mengangkat data dan fakta yang belum ter gali oleh teknik observasi. Selain itu teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam lagi data – data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Studi dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2004:218). Teknik pengumpulan data tidak langsung ini ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, dalam studi dokumentasi biasanya peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Bank tersebut.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pole berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melajukan analisis dengan langkah-langkah yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;
- c. Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian hubungan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dialapangan;
- d. Kemudian dianalisis;
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori implementasi dan transparansi informasi.